

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dapat kami selesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2022 merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan LKjIP berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative. Oleh karena itu penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad Pemerintah Kabupaten Pati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja (Renja). Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kami buat dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan Sekretariat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas publik sehingga akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pati, Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PATI



**Drs. JUMANI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Sumber Daya Aparatur .....	2
D. Aspek Strategis .....	4
D.1. Perencanaan Strategis .....	4
D.2. Tujuan .....	5
D.3. Sasaran .....	6
E. Sistematika .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Akuntabilitas Keuangan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<b>1. Perjanjian Kinerja Sekeretaris Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022</b>	
<b>2. Laporan Evaluasi Renja TW.IV Tahun 2022</b>	

## DAFTAR TABEL

	<i><b>Halaman</b></i>
Tabel 2.1. Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	9
Tabel 2.2. Pemetaan Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Sasaran Strategis .....	10
Tabel 2.3. Indikator Kinerja dan Target Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1. IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2022...	18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	19
Tabel 3.3. Pembandingan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati .....	21
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati .....	25
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kegiatan Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati .....	26
Tabel 3.6. Pembandingan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah .....	31
Tabel 3.7. Daftar Raperda Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah .....	34
Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah .....	35
Tabel 3.10. Pembandingan Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan	

	Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati .....	37
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	39
Tabel 3.12.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati .....	40
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Bagian .....	43
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja yang Belum Mencapai Target .....	44
Tabel 3.15.	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	46
Tabel 3.16.	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	50
Tabel 3.17.	Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian Tahun Anggaran 2022 .....	51

## DAFTAR GRAFIK

		<i><b>Halaman</b></i>
Grafik 1.1.	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	3
Grafik 1.2.	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 .....	4
Grafik 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	20
Grafik 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	21
Grafik 3.3.	Realisasi Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati .....	26
Grafik 3.4.	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati .....	29
Grafik 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	31
Grafik 3.6.	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	35
Grafik 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 .....	38
Grafik 3.8.	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan Dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati .....	41
Grafik 3.9.	Capaian Kinerja Bagian .....	43

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diuji. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2017 - 2022 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017-2022. Pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2017-2022

Untuk mencapai visi dan misi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Sekretariat Daerah tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis dapat tercapai dengan kategori melampaui target yaitu sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 3. Namun, ada 1 sasaran strategis yang tidak mencapai target yaitu sasaran strategis 2. Hal ini disebabkan ada dari 4 (empat) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dari target keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) Raperda pada tahun 2022 oleh karena terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan. Keberhasilan capaian Sasaran strategis Sekretariat Daerah merupakan hasil dari upaya – upaya Sekretariat Daerah, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pati dari 3 (tiga) Sasaran

Strategis yang telah ditetapkan adalah sebesar **100,59%**. Berikut capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2022 per Sasaran Strategis :



Untuk pembiayaan program/kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Pati Tahun 2022 terealisasi 87,57%. atau efisiensi sebesar 12,43% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 16.178.817.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.168.024.141,- Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, maka kedepan akan dilakukan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua bagian yang dilandasi dengan perencanaan yang terukur dan komitmen pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, perlu melakukan re-orientasi terhadap formulasi indikator kinerja program dan kegiatan supaya bisa terukur dengan tepat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
6. Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Setda Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu **“Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”**

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **C. SUMBER DAYA APARATUR**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung dengan susunan kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawan PNS sebanyak orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

### **1. Berdasarkan golongan**

Golongan IV sebanyak 20 orang, terdiri dari :

- ❖ IV/a : 6 orang
- ❖ IV/b : 11 orang
- ❖ IV/c : 2 orang
- ❖ IV/d : 1 orang

Golongan III sebanyak 93 orang, terdiri dari:

- ❖ III/a : 17 orang
- ❖ III/b : 28 orang
- ❖ III/c : 21 orang
- ❖ III/d : 27 orang

Golongan II sebanyak 35 orang, terdiri dari:

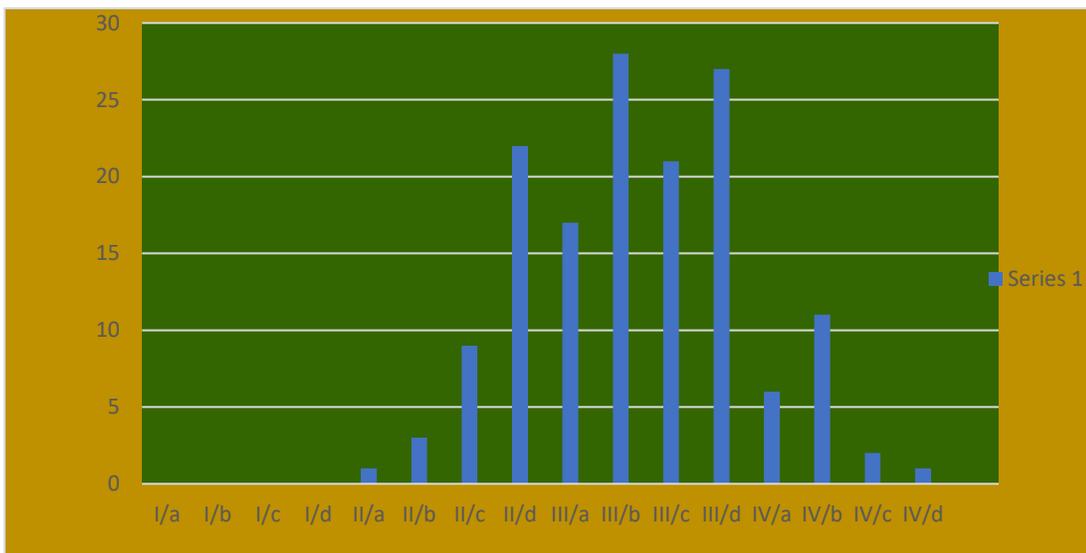
- ❖ II/a : 1 orang
- ❖ II/b : 3 orang
- ❖ II/c : 9 orang
- ❖ II/d : 22 orang

Golongan I sebanyak 0 orang, terdiri dari:

- ❖ I/a : -
- ❖ I/b :-
- ❖ I/c : -
- ❖ I/d : -

**Total : 148 orang**

**Grafik 1.1**  
**Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SETDA Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan Tahun 2022**



Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

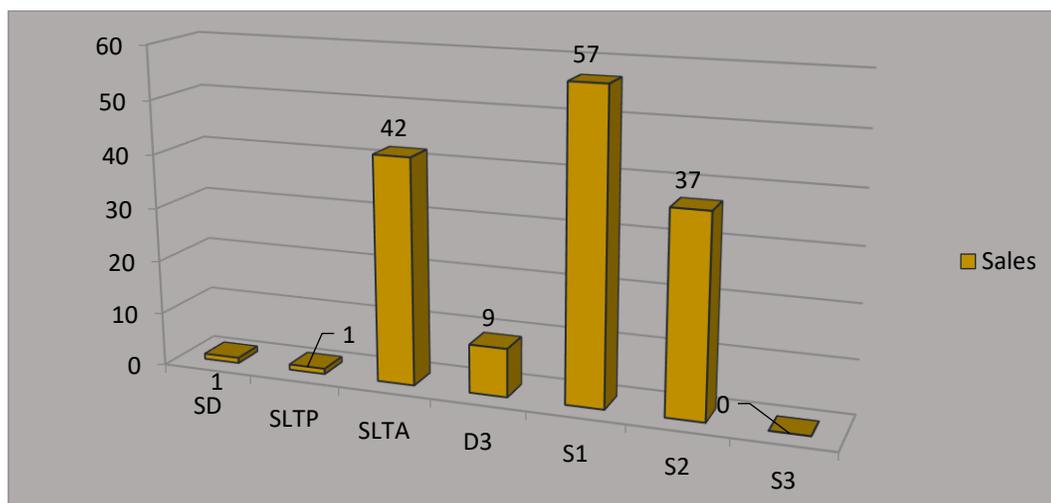
Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pegawai terbanyak di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah pegawai yang mempunyai golongan ruang yaitu III/b sebanyak 28 orang.

1) Berdasarkan pendidikan

- ❖ SD : 1 orang
- ❖ SLTP : 1 orang
- ❖ SLTA : 42 orang
- ❖ D3 : 9 orang
- ❖ S1 : 58 orang
- ❖ S2 : 37 orang



**Grafik 1.2**  
**Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Pati Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022**



*Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati*

Dari tabel di bawah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang Pendidikan sebagian besar Pegawai di Lingkup kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah Strata 1 (S1) dengan persentase atau sebanyak 57 orang.

## **D. ASPEK STRATEGIS**

### **D.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan Visi Bupati Pati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu:

## Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Merujuk pada visi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sesuai kerangka tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke-4 Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Mengutamakan Pelayanan Publik”**. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan supaya responsif, dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkelanjutan, selaras dengan Tujuan dari Sekretariat Daerah yaitu **“Mewujudkan Rumusan Kebijakan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan SDM Yang Kompeten” Dan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Instansi Pemerintah”**.

### D.2. TUJUAN

Agar pelaksanaan Misi dapat terarah dan tercapai dengan baik, maka harus pula ditetapkan tujuan, dengan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan Visi dan Misi dan meletakkan kerangka prioritas dan memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam pelaksanaannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tujuan, yaitu : Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan harapan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator utamanya, berikut ini adalah Tujuan Utama Sekretariat Daerah:

- 1) Terwujudnya Rumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.

### **D.3. SASARAN**

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran merupakan ukuran pencapaian daritujuan. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tiga pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun 2017-2022. Tiga pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;

### **E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah.

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Sub Bab ini menyajikan uraian jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022.

### **BAB IV PENUTUP**

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran berisikan data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Evaluasi Renja TW IV Tahun 2022.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah didasarkan pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Dokumen Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran dan program. Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menargetkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja Tahun 2022 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2022. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

#### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih akuntabel dan SDM yang kompeten;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.

Selanjutnya Sekretariat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	<b>Mewujudkan Rumusan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten</b>	1. SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah kabupaten Pati  2. SASARAN STRATEGIS II Meningkatnya kuantitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	<b>Nilai LKjIP</b> 1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik 2. Nilai LPPD  1. Persentase Peraturan daerah yang disetujui bersama dengan Dewan
2.	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi Pemerintah</b>	3. SASARAN STRATEGIS III Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	<b>IKM</b> 1. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi 2. Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah 3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati



		2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (P.01)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah ( Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)</li> <li>2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM</li> </ol>	1. Kegiatan Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> <li>2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> <li>3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</li> <li>4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ol>	Organisasi
		3. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)</li> <li>2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi</li> </ol>	1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</li> <li>2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</li> <li>3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</li> </ol>	Perekonomian
				2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</li> </ol>	Perekonomian
<u>SASARAN 2</u> MENINGKATNYA KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERATURAN DAERAH YANG DISETUJUI BERSAMA DENGAN DEWAN	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase verifikasi draft dokumen hukum	1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penyusunan Produk</li> <li>2. Fasilitasi Bantuan Hukum</li> <li>3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</li> </ol>	Hukum

<p><b>TUJUAN 2</b></p> <p><b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSTANSI PEMERINTAH</b></p> <p><u>SASARAN 3</u></p> <p>MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>	<p><b>IKM</b></p> <p>PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERTIB ADMINISTRASI</p> <p>EFISIENSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH</p> <p>PERSENTASE OPD YANG PENGELOLAAN PUBLIKNYA BAIK</p> <p>PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH YANG AKTIF DIAKSES MASYARAKAT</p>	1. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	<p>1. Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%</p> <p>1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)</p> <p>2. Persentase penyelesaian lelang oleh Pokja ULP</p>	<p>1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</p> <p>2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</p> <p>3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>1. Pengelolaan Pengadaam Barang dan Jasa</p> <p>2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</p>	<p>Administrasi Pembangunan</p> <p>PBJ</p>	
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (P. 01)	<p>1. Persentase Saluran Informasi Publik yang Masih Aktif</p>	<p>1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>	<p>1. Fasilitasi Keprotokolan</p> <p>2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</p> <p>3. Pendokumnetasian Tugas Pimpinan</p>	<p>Prokompim</p>	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Sekretariat Daerah Kab. Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 (Lampiran 1). Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja dan Target Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati	<b>Nilai LKjIP</b>	68
		1. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		2. Nilai LPPD	3 – 4
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	<b>IKM</b>	3,5
		1. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100%
		2. Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5%
		3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %
		4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran startegis maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan per sasaran strategis Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pemetaan Program dan Kegiatan Per Sasaran Strategis**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI
<p><b>TUJUAN 1</b></p> <p><b>MEWUJUDKAN RUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAANPE MERINTAH YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN SDM YANG KOMPETEN</b></p> <p><u>SASARAN 1</u></p> <p>MENINGKATNYA KOORDINASI PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. PATI</p>	<p><b>NILAI LKjIP</b></p> <p>1. PERSENTASE OPD YANG NILAI AKIPNYA BERKRITERIA BAIK</p> <p>2. NILAI LPPD</p>	<p>1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)</p>	<p>1. Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)</p>	<p><b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b></p>	<p><b>Rp. 8,778,276,000 ,-</b></p>
				<p>1. Fasilitasi Bina Mental Spiritual</p>	<p>Rp. 7.936.276.000 ,-</p>
				<p>2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Rp. 252.000.000 ,-</p>
			<p>2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra</p>	<p>3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Rp. 590.000.000 ,-</p>
			<p>1. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah ( Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)</p> <p>2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan</p>	<p><b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b></p>	<p><b>Rp. 1.707.072000 ,-</b></p>
				<p>1. Penataan Administrasi Pemerintah</p>	<p>Rp. 817.945.000 ,-</p>
		<p>2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</p>		<p>Rp. 807.500.000 ,-</p>	
		<p>3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</p>		<p>Rp. 81.627.000 ,-</p>	
		<p><b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b></p>		<p><b>Rp. 132.728.000 ,-</b></p>	
		<p>1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri</p>		<p>Rp. 118.042.000 ,-</p>	
		<p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintah</p>	<p>1. Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti skdalam peraturan daerah</p>	<p><b>Kegiatan Penataan Organisasi</b></p>	<p><b>Rp. 815.175.000 ,-</b></p>
				<p>1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p>	<p>Rp. 288.655.000 ,-</p>
<td> <p>Rp. 162.000.000 ,-</p> </td>	<p>Rp. 162.000.000 ,-</p>				

		Daerah Kabupaten/ Kota (P.01)	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 304.622.000 ,- Rp. 11.500.000 ,- Rp. 48.398.000 ,-
		3. Program Perekonomian dan Pembangunan (P.03)	1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil <b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<b>Rp. 284.000.000 ,-</b> Rp. 36.887.000,- Rp. 111.475.000 ,- Rp. 135.638.000,- <b>Rp. 125.000.000 ,-</b> Rp. 125.000.000,-
<b>SASARAN 2</b> MENINGKATNYA KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERATURAN DAERAH YANG DISETUJUI BERSAMA DENGAN DEWAN	1. Program Pemerintahan dan Kesra (P.02)	1. Persentase verifikasi draft dokumen hukum	<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b> 1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitas Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<b>Rp. 1.193.292.000,-</b> Rp. 249.000.000 ,- Rp. 359.292.000 ,- Rp. 585.000.000,-
<b>TUJUAN 2</b> MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSTANSI PEMERINTAH  <b>SASARAN 3</b> MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>IKM</b>  1. PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERTIB ADMINISTRASI	1. Program Perekonomian dan Pembangunan (P. 03)	1. Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b> 1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	<b>Rp. 279.000.000 ,-</b> Rp. 65.000.000 ,- Rp. 98.000.000 ,- Rp. 116.000.000 ,-

	2. EFISIENSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH 3. PERSENTASE OPD YANG PENGELOLAAN PUBLIKNYA BAIK 4. PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH YANG AKTIF DIAKSES MASYARAKAT									
							1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 125.000.000 ,-</b>	
								1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 83.200.000 ,-	
							2. Persentase penyelesaian lelang oleh Pokja ULP	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 41.800.000 ,-	
							3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (P.03)	1. Persentase Saluran Informasi Publik yang Masih Aktif	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp. 2.734.274.000 ,-</b>
									1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 152.000.000 ,-
									2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 117.000.000 ,-
									3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 2.465.274.000 ,-

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, jumlah anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 14.515.621.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.16.178.817.000,- terdiri atas Belanja Operasional dan Non Operasional.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah melakukan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati kepada Bapak Bupati Pati Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Pada bab ini disajikan laporan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Pati yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati	<b>Nilai LkjIP</b>	<b>68</b>
		1. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		2. Nilai LPPD	3 – 4
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	<b>IKM</b>	<b>3,5</b>
		1. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100 %
		2. Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5 %
		3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %
		4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pati 2017-2022

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	<100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	KATEGORI
				2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati	<b>Nilai LkjIP</b>	<b>68</b>	<b>61,94</b>	<b>63,26</b>	<b>65,04</b>	<b>64,60</b>	<b>64,60*</b>	<b>95 %</b>	<b>TIDAK MENCAPAI TARGET</b>
		1. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90 %	100%	100%	100%	100%	100 %	111,11 %	MELEBIHI TARGET
		2. Nilai LPPD	3 – 4	3,47	3,31	3,55	3,55*	3,55*	118,56 %	MELEBIHI TARGET
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98 %	160%	142,85%	88,80%	78,57%	63,63 %	64,93 %	TIDAK MENCAPAI TARGET
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik	<b>IKM</b>	<b>3,5</b>	<b>3,07</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,55</b>	<b>101,43 %</b>	<b>MELAMPAUI TARGET</b>
		1. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	MENCAPAI TARGET
		2. Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5 %	6,39%	12,90%	15,80%	23,23%	18,13 %	241,73 %	MELAMPAUI TARGET
		3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	MENCAPAI TARGET
		4. Persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100 %	100%	103,09%	100%	100%	100 %	100%	MENCAPAI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati, \* : Nilai Tahun 2021, Nilai LPPD Tahun 2018, Nilai Tahun 2022 masih dalam proses olah data

Rata-rata Capaian IKU Setda pada Tahun 2022 sebesar 114,75 % atau melebihi target. Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut:

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022**



Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap Sasaran Strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan :

1. Melakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu,
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
5. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis terhadap Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada masa akhir Renstra, disajikan sebagai berikut :

## Sasaran I "Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati"

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dengan indikator kinerja nilai LKjIP, Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik, dan nilai LPPD. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Sekretariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran 1 Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

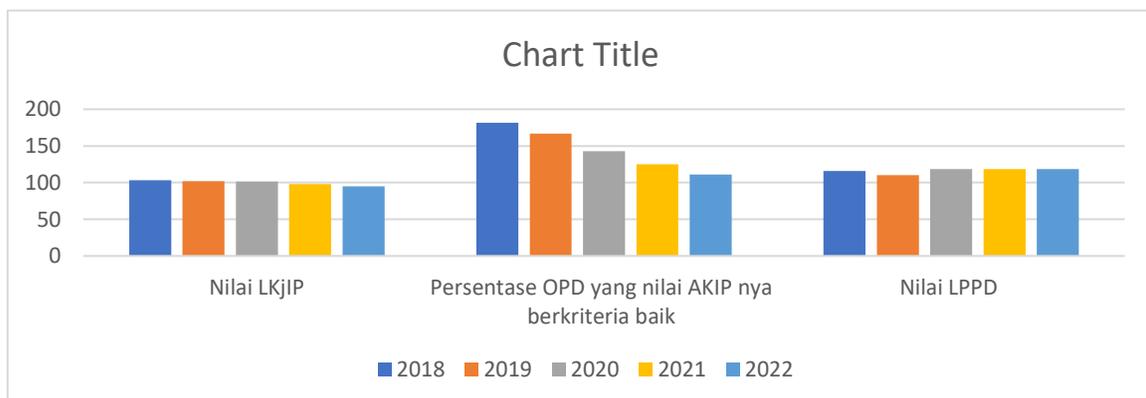
**Tabel 3.3**  
**Tabel Perbandingan Sasaran strategis 1 Meningkatkan Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kab. Pati Jika dibandingkan dengan Tahun lalu**

No	Sasaran Strategi I	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya Koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Pati	Nilai LkjIP	68	61,94	63,26	65,04	64,60	64,60*	95 %	TIDAK MENCAPAI TARGET
		1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	MELAMPAUI TARGET
		2. Nilai LPPD	3-4	3,47	3,31	3,55	3,55*	3,55*	118,56%	MELAMPAUI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

\* : Capaian LkjIP Tahun 2021, Capaian LPPD Tahun 2018, Capaian data Tahun 2022 masih dalam proses olah data

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis I Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022**



Berdasarkan Tabel 3.2 diatas nilai rata- rata dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 108,22% (melebihi/ melampaui target). Realisasi capaian Sasaran Startegis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati sebesar 108,22% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut

$$((95\% + 111,11\% + 118,56\%) \times 100) : 3 = 108,22\%.$$

2. Jika dibandingkan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Pati mengalami sedikit penurunan point penilaian dari 65,04 pada Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020 menjadi 64,60 pada Tahun 2021, sehingga ada penurunan sebesar 0,44 point. Kendati demikian Kabupaten Pati masih tetap pada predikat nilai B, dimana nilai B ada pada interval point 60 s/d 69. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pada dasarnya Kabupaten Pati sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Kabupaten Pati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut adalah upaya perbaikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah;
  - Telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2023 - 2026;
  - Meningkatkan kualitas pelaporan baik laporan monitoring triwulan, maupun laporan kinerja tahunan dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan dalam capaian kinerja, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya;
  - Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Pati dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran,

pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan, dan nantinya akan berpengaruh terhadap penyempurnaan implementasi SAKIP di Kabupaten Pati.

3. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilai realisasi indikator kinerja pada sasaran strategi I Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah, ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Nilai LKjIP Tahun 2022. Hal ini Disebabkan oleh: Realisasi Nilai LKjIP yang disajikan pada Tahun 2022 adalah Realisasi Nilai LKjIP pada Tahun 2021, oleh karena capaian nilai LKjIP pada Tahun 2022 masih dalam proses olah data dan hasilnya akan di umumkan secara resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sampai dengan akhir Februari 2023, sekalipun terjadi penurunan Realisasi Capaian kinerja di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target, akan tetapi kami tetap optimis bahwa nilai LKjIP Kabupaten Pati di Tahun 2022 akan meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu ada 2 (dua) indikator yang capaiannya melampaui target yaitu nilai AKIP, dan nilai LPPD Kabupaten Pati. Nilai AKIP memperoleh 100% atau sebesar 111,11% dimana target pada Tahun 2022 adalah sebesar 90%. Selanjutnya untuk nilai LPPD pada Tahun 2022 sebesar 3,557% yakni masih mengikuti nilai LPPD pada tahun 2018, oleh karena nilai LPPD pada Tahun 2022 masih dalam proses olah data. Dengan demikian, 3 indikator kinerja (nilai LKjIP, nilai AKIP, dan nilai LPPD) tersebut harus tetap dipertahankan dan diusahakan untuk naik nilainya dari tahun ke tahun untuk dapat memenuhi target akhir Renstra sampai Tahun 2022. Untuk itu upaya – upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang dikoordinasi oleh Bagian Organisasi telah melaksanakan koordinasi dan mengintensifkan monitoring, pembinaan dan fasilitasi penyusunan LKjIP, melaksanakan fasilitasi kepada seluruh OPD untuk melengkapi dokumen AKIP secara lengkap meliputi dokumen renstra, IKU dan PK (Perjanjian Kinerja) sesuai prosedur, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah secara menyeluruh. Selain itu untuk memacu semangat Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan Kinerja mereka, Bagian Organisasi mengadakan lomba Penilaian Kinerja yang diikuti oleh 51 OPD. Dalam penilaian kinerja ini ada 4 (empat) aspek yang dinilai: SAKIP, Evaluasi Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan

suatu organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat dijadikan perbaikan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di Renstra perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Pati.

2. Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada OPD secara intensif. Nilai LPPD Kabupaten Pati yang dinilai di tingkat Nasional pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 3,55 dengan status kinerja ST (Sangat Tinggi), dimana dengan rentan Target 3-4.

Adapun strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 1 "**Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati**" ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Ada 6 (enam) kegiatan yang berasal dari 3 (tiga) program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 "**Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati**" diantaranya adalah :

### **Program**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

### **Kegiatan**

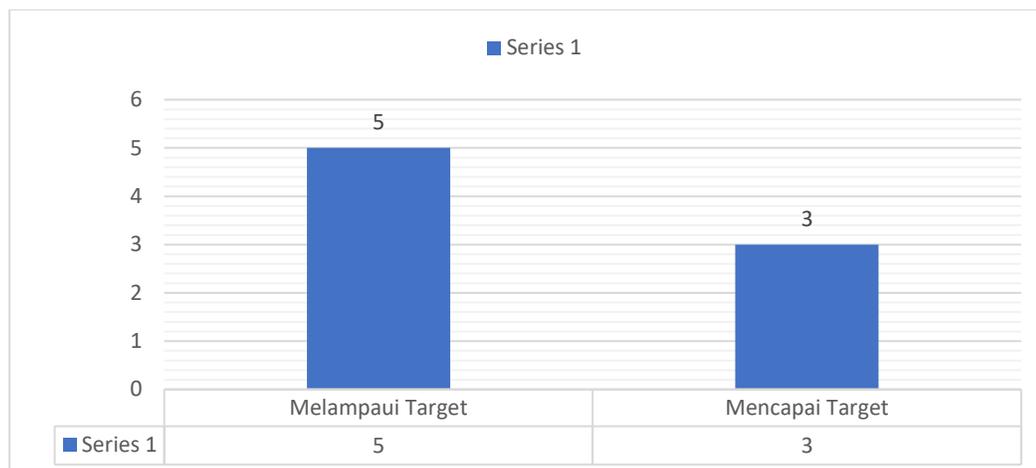
1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
2. Administrasi Tata Pemerintahan;
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
4. Penataan Organisasi;
5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022**

No	Indikator Program	Formula	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Kategori	Koordinator
1	Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	99%	100%	101,01%	Melampaui Target	Bagian Kesra
2	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	Jumlah analisis bidang Kesra yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Kesra
3	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah ( Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang Tata Pemerintahan daerah yang sudah tindak lanjuti dalam kebijakan daerah dibanding peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Tapem
4	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Jumlah analisis bidang tata pemerintah daerah yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	95%	100%	105,26%	Melampaui Target	Bagian Tapem
5	Persentase peraturan bidang Organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah ( Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Organisasi
6	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	Jumlah analisis bidang Organisasi dan SDM yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Organisasi
7	Persentase peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	Jumlah peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dibanding jumlah peraturan pemerintah atas	100%	100%	100%	100%	Mencapai Target	Bagian Perekonomian
8	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	Jumlah analisis bidang ekonomi yang tersaji dibanding jumlah analisis yang dibutuhkan	100%	83%	100%	120,48%	Melampaui Target	Bagian Perekonomian

Sumber : Bagian di lingkungan Setd

**Grafik 3.3**  
**Realisasi Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati**



**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022**

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. PERSENTASE PERATURAN BIDANG KESRA YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)</b>	<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESRA</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Jenis dokumen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Kesra</b>
<b>2. PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISI KEBIJAKAN BIDANG KESRA</b>	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi kepada jamaah haji Kabupaten Pati	Laporan	5	5	100%	Bagian Kesra
		Jumlah Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan hasil monev bantuan tempat ibadah	Laporan	12	12	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan kegiatan keagamaan	laporan	9	9	100%	Bagian Kesra
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang diselenggarakan	Laporan	6	6	100%	Bagian Kesra
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan update data bidang kesos	Laporan	6	6	100%	Bagian Kesra
		Jumlah sarana transportasi mudik lebaran yang tersedia	unit	10	10	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan studi komparatif	Laporan	1	1	100%	Bagian Kesra
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	jumlah laporan hasil koordinasi P4GN	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra
		Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan HIV AIDS	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra

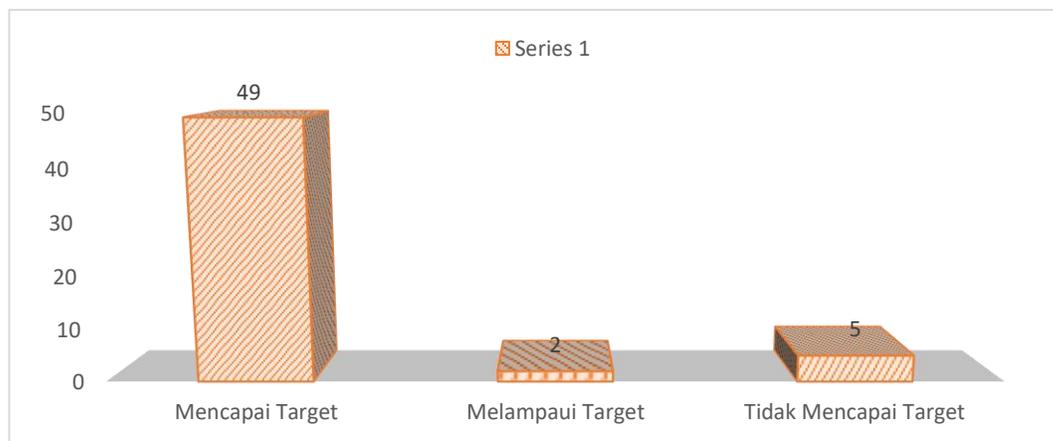
	Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi bidang Kesehatan	Laporan	2	2	100%	Bagian Kesra	
		Jumlah laporan kebijakan daerah bidang kesra	Dokumen	2	2	100%	Bagian Kesra	
<b>3. PERSENTASE PERATURAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH ( PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE</b>	<b>ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan</b>	<b>Jenis dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Tapem</b>	
<b>4.PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN</b>	1. Penataan Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	2	2	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan PATEN	Laporan	1	2	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan rakor kewilayahan	Laporan	12	12	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan rakor pejabat PD	Laporan	12	9	75%	Bagian Tapem	
		Jumlah Laporan SPM	Laporan	1	1	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	2	2	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah tayangan LPPD	Media	1	1	100%	Bagian Tapem	
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah aparatur desa yang dibina	Desa	401	401	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah izin penataan dan pemanfaatan tanah kas desa	izin	20	76	380%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan monev pelaksanaan pilkades serentak	Jenis Dokumen	0	0	0%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi, dan monev pengisian perangkat desa	Desa	250	200	80%	Bagian Tapem	
		Jumlah laporan fasilitasi penanganan kasus penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan	5	5	100%	Bagian Tapem	
		Jumlah rancangan peraturan tentang desa	Peraturan	2	2	100%	Bagian Tapem	
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan yang dilaksanakan	Dokumen	5	5	100%	Bagian Tapem
	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendukung kegiatan pemilu		Laporan	2	2	100%	Bagian Tapem	
	Jumlah peserta sosialisasi Kerjasama otonomi daerah		Orang	120	120	100%	Bagian Tapem	
		<b>FASILITASI KERJASAMA DAERAH</b>	<b>Jumlah fadilitasi Kerjasama daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama dalam negeri	Dokumen	20	20	100%	Bagian Tapem
		2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama luar negeri	Dokumen	1	1	100%	Bagian Tapem
		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan evaluasi Kerjasama	Laporan	2	2	100%	Bagian Tapem
	<b>PERSENTASE PERATURAN BIDANG ORGANISASI DAN SDM APARATUR YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM PERATURAN DAERAH</b>	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penataan organisais</b>	<b>Jenis dokumen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Organisasi</b>

<b>PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG ORGANISASI DAN SDM</b>	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Anjab, ABK, dan Evjab	Dokumen	2	2	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah dokumen draft Perda/Perbup Bidang Kelembagaan	kebijakan	5	5	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah laporan hasil monev kelembagaan	Laporan	1	1	100%	Bagian Organisasi	
	2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah aturan pelayanan publik dan tata laksana	Peraturan	1	1	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah dokumen peningkatan implementasi bidang ketatalaksanaan	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	49	49	100%	Bagian Organisasi	
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kebijakan pengukuran kinerja aparatur daerah dan pengembangan SDM	Kebijakan	1	1	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan budaya kerja	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan manajemen kinerja	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi	
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi	PD	49	49	100%	Bagian Organisasi	
	4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	1	1	100%	Bagian Organisasi	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	Laporan	1	1	100%	Bagian Organisasi	
	<b>PERSENTASI PERATURAN BIDANG EKONOMI YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)</b>	<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	<b>Jenis Dokumen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI</b>	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi dan pembinaan BUMD dan BLUD	Laporan	44	44	100%	Bagian Perekonomian
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah laporan/ analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Laporan	35	35	100%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi promosi daerah	Laporan	0	0	0%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi EKUINDA	Laporan	2	2	100%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan distribusi dan harga pupuk	Laporan	27	27	100%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan pengumpulan informasi dan sosialisasi tentang cukai	Laporan	4	4	100%	Bagian Perekonomian	

		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan	30	30	100%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi TPKAD	Laporan	15	20	133,33%	Bagian Perekonomian	
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi pembinaan dan pengembangan LKM	Laporan	20	20	100%	Bagian Perekonomian
			Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pemantauan dan pengawasan dana bergulir dan koordinasi kredit program	Laporan	40	40	100%	Bagian Perekonomian
			Jumlah laporan/ analisis hasil kordinasi pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Laporan	2	2	100%	Bagian Perekonomian
	<b>PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
	1. Koordinasi , Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Dokumen	1	1	100%	Bagian Perekonomian	
		Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal	Laporan	1	0	0%	Bagian Perekonomian	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.4**  
**Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati**



Berdasarkan Grafik 3.4 di atas Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terlihat bahwa dari 56 (lima puluh enam) indikator sub kegiatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) sub kegiatan dan 6 (enam) kegiatan, ada 2 (dua) indikator sub kegiatan yang melebihi target, 49 (empat puluh sembilan) indikator sub kegiatan yang mencapai target, dan 5 (lima) indikator sub kegiatan tidak mencapai target. Berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

**1. Indikator Sub Kegiatan yang difocusing secara Total dan Indikator Sub Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2022 ada 2 (dua) Indikator Sub Kegiatan.**

Pada Sasaran Strategis 1 “**Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati**” ada 2 (dua) indikator sub kegiatan yang persentase Realisasi Capaiannya kinerjanya sebesar 0% disebabkan karena **Tidak Ada Pelaksanaan pada Tahun 2022** sehingga sangat berpengaruh pada Realisasi Kinerja. 2 (dua) Kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan monev pelaksanaan pilkades serentak;
- b. Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi promosi daerah.

**2. Jumlah Laporan Rakor Pejabat PD.**

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan rakor pejabat PD, hanya mencapai persentase sebesar 75% dari target 12 laporan hanya terealisasi; 9 laporan disebabkan karena indikator ini bersifat sediaan menyesuaikan petunjuk dari Pimpinan.

**3. Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Monev Pengisian Perangkat Desa.**

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan fasilitasi, koordinasi, dan monev pengisian perangkat daerah hanya mencapai persentase sebesar 80% dari target 250 formasi hanya terealisasi 200 formasi disebabkan karena adanya desa yang formasi perangkatnya kosong tetapi tidak mengajukan formasi, dan ada pula desa yang mengajukan formasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.

**4. Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC illegal.**

Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC illegal sebesar 0% dari target 1 laporan terealisasi 0 laporan disebabkan karena anggaran pada indikator sub kegiatan tersebut digeser ke Satpol PP oleh karena adanya Surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 perihal .

## Sasaran II "Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah"

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah Sasaran Persentase Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan Dewan. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran 2 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**Tabel Perbandingan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya Periode Renstra 2017-2022**

No	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Peraturan Daerah Yang Disetujui Dengan Dewan	98%	160%	142,85 %	88,88 %	78,57 %	63,63 %	64,93%	TIDAK MENCAPAI TARGET

*Sumber: bagian hukum setda kabupaten Pati*

**Grafik 3.5**

**Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 Sekretariat Daerah Kab. Pati Tahun 2022**



Berdasarkan Tabel 3.5 diatas capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 98%. Realisasi kinerja Sasaran Startegis 2 sebesar 64,93% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui bersama Dewan}}{\text{Jumlah Raperda dalam Pembahasan}} \times 100 \%$$

$$= (7/11) \times 100\% = 63,63$$

Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar 64,93% diperoleh dari :

$$= (\text{Realisasi Kinerja/ Target Kinerja}) \times 100\% = (63,63/98) \times 100 \% = 64,93\%$$

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Target dari indikator kinerja Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama dengan Dewan pada Tahun 2022 adalah sebesar 98% dengan realisasi sebesar 63,63% yang berarti capaian kinerja indikator persentase peraturan daerah yang disetujui Bersama dengan Dewan **tidak mencapai target**. Hal ini disebabkan karena ada dari 3 (tiga) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dan 1 (satu) Raperda telah difasilitasi Gubernur dalam proses persetujuan bersama. Berikut kami jelaskan dalam table di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Daftar Raperda Tahun 2022**

NO	PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1	PERDA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH	Telah menjadi Produk Hukum
2	PERDA NO 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	Telah menjadi Produk Hukum
3	PERDA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	Telah menjadi Produk Hukum
4	PERDA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021	Telah menjadi Produk Hukum
5	PERDA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024	Telah menjadi Produk Hukum
6	PERDA NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022	Telah menjadi Produk Hukum
7	PERDA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2023	Telah menjadi Produk Hukum
8	RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	Belum menjadi Produk Hukum tetapi telah difasilitasi

		Gubernur dan dalam proses persetujuan Bersama
9	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	Masih dalam pembahasan sampai dengan akhir 2022
10	RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PATI	Masih dalam pembahasan sampai dengan akhir 2022
11	RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN	Masih dalam proses persetujuan pembahasan oleh Mendagri

Sumber : Bag. Hukum Setda Kab.Pati

2. Jika dibandingkan antara capaian kinerja indikator kinerja Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Dengan Dewan Tahun 2021 realisasi Tahun 2022 adalah terjadi penurunan persentase dimana pada Tahun 2022 adalah sebesar 63,63% dan Tahun 2021 adalah sebesar 78,57%. Hal ini disebabkan karena terdapat substansi atau materi Raperda yang belum di capai kesepakatan dalam tahap pembahasan. Sebagai upaya tindak lanjut adalah:
  - ❖ Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap permohonan persetujuan yang telah diajukan
  - ❖ Melakukan Koordinasi dan konsultasi ke Instansi terkait tentang substansi yang belum disepakati bersama dengan DPRD.
3. Jika dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat penurunan capaian mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 88,88%, tahun 2021 sebesar 78,57%, dan tahun 2022 sebesar 63,63% hal ini disebabkan karena :
  - ❖ Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di wilayah Kabupaten Pati sejak awal tahun 2020 telah mengakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
  - ❖ Adanya paradigma kebijakan Pemerintah Pusat agar Daerah lebih selektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak menjadikan banyaknya perundang-undangan sebagai ukuran kinerja.
  - ❖ Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengharuskan Daerah untuk melakukan inventarisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah yang ada.
  - ❖ Tahun 2022 merupakan tahun transisi dimana masa jabatan Bupati Pati berakhir dan ditunjuk Penjabat Bupati Pati dimana untuk pembahasan dan

penandatanganan produk hukum Daerah oleh Penjabat Bupati Pati sesuai dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sehingga tahapan dalam proses Raperda harus mengikuti mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- ❖ Terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan.

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis II **“Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022”** ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah antara lain :

### Program

Program Pemerintahan dan Kesra;

### Kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;

Untuk mengukur realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Program	Formula	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	PRESENTASE VERIFIKASI DRAFT DOKUMENTASI HUKUM	Jumlah produk hukum yang telah selesai diverifikasi menjadi produk hukum dibanding draft produk hukum yang diajukan /masuk	98%	100%	100%	99,36 %	98,82 %	98,67 %	100,68%	MELAMPAUI TARGET

Sumber : Bag. Hukum Setda Kab. Patii

Dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

No	Produk Hukum	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Konsep Yang Masuk	Realisasi	Konsep Yang Masuk	Realisasi
1	Surat Keputusan	1254 Dokumen	1250 Dokumen	585 Dokumen	576 Dokumen
2	Raperbup	94 Dokumen	86 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen
<b>JUMLAH</b>		<b>1348Dokumen</b>	<b>1336 Dokumen</b>	<b>675 Dokumen</b>	<b>666 Dokumen</b>

Dengan perhitungan realisasi sebagai berikut:

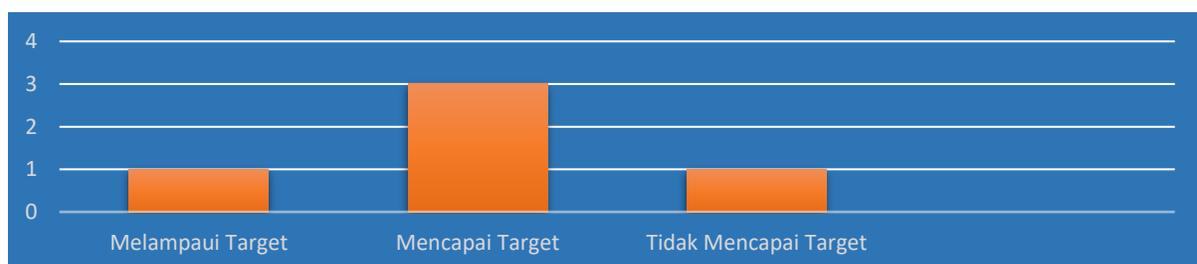
$$= (\text{Produk Hukum yang selesai diverifikasi} / \text{Produk Hukum yang masuk}) \times 100 = (666 / 675) \times 100 = 98,82\%.$$

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROSENTASE VERIFIKASI DRAFT DOKUMENTASI HUKUM</b>	<b>1. FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Jenis dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Hukum</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	Perda	7	11	157,14%	Bagian Hukum
		Jumlah SK Bupati	SK	1.050	675	64,29%	Bagian Hukum
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum masyarakat miskin	Kasus	12	10	83,33%	Bagian Hukum
		Jumlah kasus aparatur	Kasus	3	2	66,67%	Bagian Hukum
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku LD dan BD	Jenis	2	2	100%	Bagian Hukum
		Jumlah JDIIH yang dikelola	Bulan	12	12	100%	Bagian Hukum
Jumlah orang yang disosialisasi		orang	840	840	100%	Bagian Hukum	

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Pati

**Grafik 3.6**  
**Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2**



Berdasarkan Grafik 3.6 dapat disimpulkan bahwa dari 7 Indikator Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Perumusan Kebijakan Daerah" ada 3 Indikator Sub Kegiatan yang capaian kerjanya tidak mencapai target yaitu:

**1. Indikator Kinerja Jumlah SK Bupati;**

**2. Indikator Kinerja Jumlah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;**

**3. Indikator Kinerja Jumlah Kasus Aparatur**

Disebabkan karenakan ketiga indikator diatas bersifat sediaan sehingga realiasainya sesuai dengan konsep dan kasus yang masuk pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.

### Sasaran III

#### “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, ditetapkanlah sasaran : Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik dengan indikator IKM, persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi, Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah, persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik, dan persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat. Berikut adalah hasil pengukuran penetapan kinerja Seketariat Daerah yang telah dicapai tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian atas indikator kinerja Sasaran Strategis 3 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Tabel Pemanding Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya Periode 2017-2022**

No	Sasaran Strategi 3	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori	
				2018	2019	2020	2021	2022			
1	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik</b>	IKM	3,5	3,07	3,33	3,33	3,4	3,55	101,43%	MELAMPAUI TARGET	
		1	Presentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
		2	Efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah	7,5	6,39	12,9	15,8	23,23	18,13	241,73%	MELAMPAUI TARGET
		3	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
		4	Presentase saluran informasi public pemerintah yang aktif diakses masyarakat	100	100	100	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3 Sekretariat**  
**Daerah Kab. Pati Tahun 2022**



Berdasarkan Tabel 3.7 diatas capaian Sasaran Strategis 3: **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”** telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 128,63% (melebihi/ melampaui target). Realisasi capaian sebesar 128,63% tersebut diperoleh dari perhitungan sebagaimana berikut=  $(101,43\% + 100\% + 241,73\% + 100\% + 100\%) : 5 = 128,63\%$ .

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 5 (lima) indikator kinerja ada 2 (dua) indikator kinerja yang nilainya >100% yang artinya melampaui target dan ada 3 (tiga) indikator kinerja nilainya 100% yang artinya mencapai target.
2. Selama Periode Renstra 2017-2022 ada indikator yang paling menonjol perolehan realisasinya yaitu indikator kinerja **Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah** dimana realisasi efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah pada Tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara nilai efisiensi dengan *total HPS Tender*. Sedangkan untuk mendapatkan nilai efisiensi diperoleh dari selisih antara total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tender dikurangi total kontrak selama tahun 2022. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Total HPS tender} - \text{total kontrak})}{\text{Total HPS tender}} \times 100\% \\
 &= \frac{(129.492.062.650 - 106.020.047.068)}{129.492.062.650} \times 100\% \\
 &= 18,13\%
 \end{aligned}$$

Strategi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 3 ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 3 antara lain :

## Program

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

## Kegiatan

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pengukuran realisasi program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran Strategis 3 Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022**

No	Indikator Program	Formula	Target 2022	Realisasi					Capaian 2022	Kategori
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	<b>PROSENTASE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SKPD YANG REALISASI KEGIATAN DI ATAS 90%</b>	Jumlah OPD yang prosentase kegiatannya diatas 90% dibanding seluruh OPD yang melaksanakan kegiatan	100	-	100	78,43	87,75	89,79	89,79%	TIDAK MENCAPAI TARGET
2.	<b>PERSENTASE PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/ JASA YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)</b>	Jumlah aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditindak lanjuti	100	-	-	-	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
3.	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN LELANG OLEH POKJA ULP</b>	Jumlah paket lelang yang selesai dilelangkan dibanding jumlah seluruh rencana lelang yang diajukan	99	-	100	100	100	100	101,01%	MELAMPAUI TARGET

4.	<b>PERSENTASE SALURAN INFORMASI PUBLIK YANG AKTIF</b>	Jumlah saluran informasi publik yang aktif diakses masyarakat dibanding seluruh saluran informasi publik yang dikelola Setda	100	88,82	103,09	100	100	100	100%	MENCAPAI TARGET
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	-----	-----	-----	------	-----------------

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Dari Tabel 3.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 4 (empat) indikator program yang ada pada Sasaran Strategi 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik ada 1 (satu) indikator program yang belum mencapai target yaitu **Prosentase Pengendalian Pembangunan SKPD yang Realisasi Kegiatan di Atas 90% dengan realisasi sebesar 89,79%** dari target sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena dari sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) OPD yang ada di Kabupaten Pati yang mempunyai nilai rata rata realisasi kegiatan di atas 90% hanya ada 44 (empat puluh empat) OPD disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

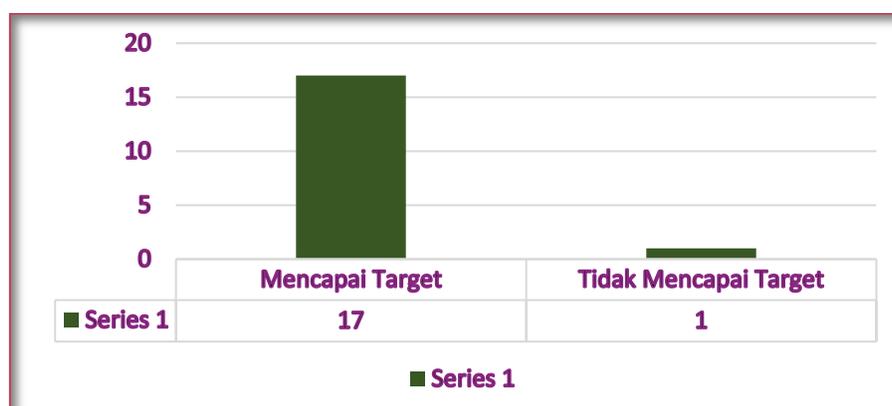
**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022**

Indikator Kinerja Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Koordinator
				Target	Realisasi	Capaian	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROSENTASE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SKPD YANG REALISASI KEGIATAN DI ATAS 90%</b>	<b>1. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		<b>Jenis dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Adpemb</b>
<b>PERSENTASE PERATURAN BIDANG PENGADAAN BARANG/ JASA YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI DALAM KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, INSTRUKSI BUPATI, SE)</b>	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100%	Bagian Adpemb
<b>PERSENTASE PENYELESAIAN LELANG OLEH POKJA ULP</b>	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen laporan money pembangunan infrastruktur	Laporan	1	1	100%	Bagian Adpemb
<b>PERSENTASE SALURAN</b>		Jumlah dokumen rakor POK	Dokumen	4	4	100%	Bagian Adpemb

<b>INFORMASI PUBLIK YANG AKTIF</b>	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan monev pembangunan	laporan	33	33	100%	Bagian Adpemb
		Jumlah SMEP dan TEPPRA yang di Kelola	Laporan	12	3	25%	Bagian Adpemb
	<b>2. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Jenis Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian PBJ</b>
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monev PBJ	Laporan	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah laporan strategis pengadaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah paket yang dikelola ULP selama setahun	Paket	180	88	48,89%	Bagian PBJ
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan penggunaan dan pengelolaan LPSE	Laporan	12	12	100%	Bagian PBJ
		Jumlah pengembangan aplikasi SIM ULP	Paket	1	1	100%	Bagian PBJ
		Jumlah system informasi yang dikelola	Unit	2	2	100%	Bagian PBJ
		Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE	Dokumen	17	17	100%	Bagian PBJ
	<b>3. PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>Jumlah fasilitasi keprotokol dan kompim yang dihasilkan</b>	<b>Laporan kegiatan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>Bagian Prokompim</b>
	1. Fasilitasi Keprotokol	Jumlah laporan kegiatan keprotokol	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokom;im
	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan komunikasi pimpinan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan jenis informasi publikasi	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan kegiatan KD dan WKD yang didokumentasikan	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan publikasi yang terpasang	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim
		Jumlah laporan unit media elektronik yang dikelola	Laporan	12	12	100%	Bagian Prokompim

Sumber : Bagian di lingkungan Setda

**Grafik 3.8**  
**Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik**



Berdasarkan grafik 3.8 diatas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik terlihat bahwa seluruh indikator sub kegiatan dengan total 18 (delapan belas) indikator sub kegiatan, ada sebanyak 16 (enam belas) indikator sub kegiatan yang mencapai target dan 2 (dua) indikator sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu

- 1. Indikator sub kegiatan jumlah paket yang dikelola ULP selama satu tahun** dengan perolehan capaian sebesar 48,89% dikarenakan bersifat sediaan sesuai dengan jumlah paket yang masuk dari OPD.
- 2. Indikator sub kegiatan jumlah SMEP dan TEPPRA yang dikelola** dengan perolehan capaian sebesar 25% dikarenakan aplikasi TEPPRA sementara dinonaktifkan dari pusat oleh karena adanya peralihan SIMDA yang lama ke SIMDA yang sudah terintegrasi.

## EVALUASI KINERJA

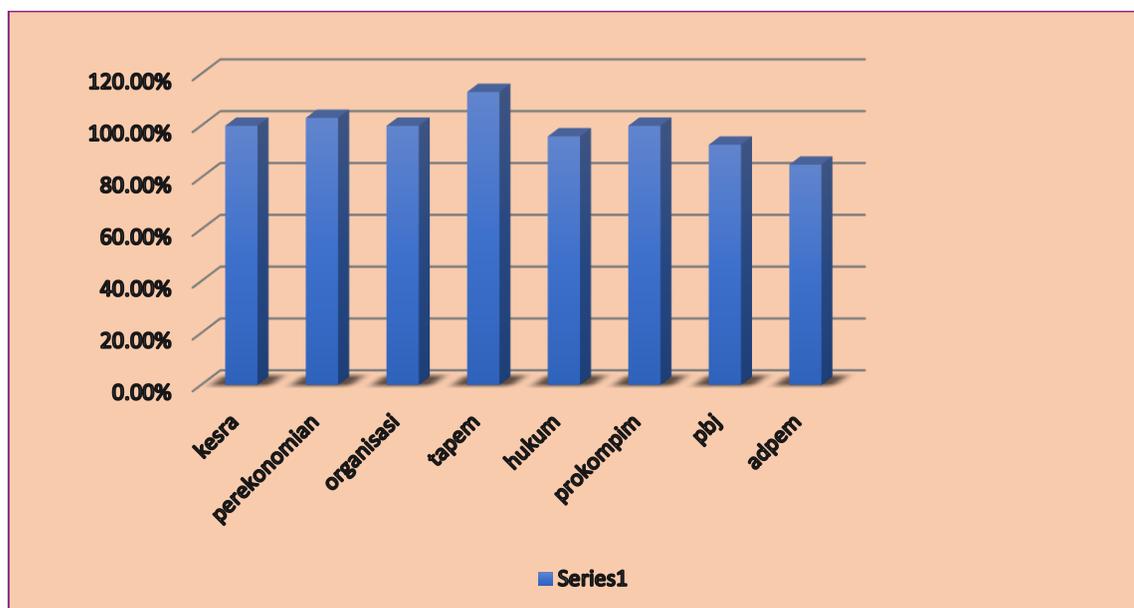
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari data yang kami peroleh, berikut tingkat capaian kinerja per bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Bagian**

No	Bagian	Capaian Kinerja %	Tingkat Keberhasilan
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	BAIK
2	Bagian Perekonomian	103,03%	SANGAT BAIK
3	Bagian Organisasi	100%	BAIK
4	Bagian Tata Pemerintahan	113,05%	SANGAT BAIK
5	Bagian Hukum	95,92%	BAIK
6	Bagian Administrasi Pembangunan	85%	CUKUP
7	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	92,70%	BAIK
8	Bagian Prokompim	100 %	BAIK

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Grafik 3.9**  
**Capaian Kinerja Bagian**



Dari Grafik 3.9 dapat kita analisa bahwa ada masih ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi, yaitu indikator yang capaian kinerjanya belum mencapai target, sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Yang Belum Mencapai Target**

No	Indikator Kinerja	Satuan (Bentuk Data)	Tahun 2022			Penyebab	Solusi ke Depan
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peraturan Daerah yang Disetujui Bersama Dengan Dewan	Persentase	98	63,63	64,94%	Terdapat substansi/ materi Raperda yang belum dicapai kesepakatan dalam tahap pembahasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terhadap permohonan persetujuan yang telah diajukan;</li> <li>Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait tentang substansi yang belum disepakati dengan DPRD;</li> <li>Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara lebih cermat, sehingga dapat memenuhi target kinerja;</li> <li>Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun agar diperoleh <i>outcome</i> yang diharapkan;</li> <li>Dilakukan koordinasi yang lebih intens</li> </ol>
2	Jumlah Laporan Rakor Pejabat PD	Laporan	12	9	75%	Bersifat sediaan sesuai dengan permintaan pimpinan	
3	Jumlah laporan fasilitasi ,koordinasi,dan monev pengisian perangkat desa	formasi	250	200	80%	Adanya Desa yang gagal dalam seleksi administrasi pengisian perangkat Desa	
4	Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC Ilegal	Laporan	1	0	0%	Anggaran digeser ke Satpol PP oleh karena adanya Surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022	
5	Jumlah SK Bupati	SK	1.050	675	64,29%	Bersifat sediaan sesuai dengan konsep SK yang masuk pada Bagian Hukum	
6	Jumlah Bantuan Hukum masyarakat miskin	Kasus	12	10	83,33%	Bersifat sediaan sesuai dengan kasus Hukum masyarakat miskin yang masuk pada Bagian Hukum.	
7	Jumlah Kasus Aparatur	Kasus	3	2	66,67%	Bersifat sediaan sesuai dengan kasus Hukum aparatur pada Bagian Hukum.	
8	Jumlah SMEP dan TEPPRA yang dikelola	Laporan	12	3	25%	aplikasi TEPPRA sementara dinonaktifkan dari pusat oleh karena adanya peralihan SIMDA yang lama ke SIMDA yang sudah terintegrasi.	
9	Jumlah paket yang dikelola ULP selama satu tahun	Paket	180	88	48,89%	Bersifat sediaan sesuai dengan paket yang masuk dari OPD.	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Merujuk pada kegiatan yang masih belum mencapai target, secara garis besar yang disebabkan oleh karena bersifat sediaan sehingga hal ini secara tidak langsung berpengaruh dalam pencapaian realisasi kinerja. Selain itu evaluasi atas perencanaan kinerja yang disusun dan ditetapkan agar target yang diharapkan dapat dicapai bahkan lebih. Langkah ke depan, dalam perencanaan perlu menetapkan target yang tepat dan selaras (sesuai dengan PK (Perjanjian Kinerja) dan Renstra Setda Kab. Pati tahun 2023-2026). Selain itu dalam menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, menetapkan indikator yang terukur dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan setelah adanya perubahan anggaran dapat digambarkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	REALISASI	%	BAGIAN
<b>SASARAN I</b> <b>Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah kabupaten Pati</b>	1. Persentase peraturan bidang Kesra yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Kesra	<b>1. Pelaksanaan Kebijakan Kesra</b>	<b>Rp.7,593,276,000</b>	<b>Rp.8,778,276,000</b>	<b>Rp. 1,185,000,000</b>	<b>Rp. 7,418,647,102</b>	<b>84.51 %</b>	<b>Bagian Kesra</b>
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.6,751,276,000	Rp. 7,936,276,000	Rp.1,185,000,000	Rp. 6,617,704,177	83,89%	Bagian Kesra
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp.252,000,000	Rp. 252,000,000	-	Rp. 231,823,475	91,99%	Bagian Kesra
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait masyarakat	Rp. 590,000,000	Rp. 590,000,000	-	Rp.569,119,450	96.46%	Bagian Kesra
	1. Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah ( Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE) 2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	<b>1. Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp.1,707,072,000</b>	<b>Rp.1,707,072,000</b>	<b>-</b>	<b>Rp.1,616,103,134</b>	<b>94,67%</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Penataan Administrasi Pemerintah	Rp. 817,945,000	Rp. 817,945,000	-	Rp. 804,827,325	98,40%	Bagian Tapem
		2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 807,500,000	Rp. . 807,500,000	-	Rp.745,430,150	92,31%	Bagian Tapem
		3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 81,627,000	Rp. 81,627,000	-	Rp. 65,845,659	80,67%	Bagian Tapem
		<b>2. Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Rp.132,728,000</b>	<b>Rp. 132,728,000</b>	<b>-</b>	<b>Rp.120,314,200</b>	<b>90,65%</b>	<b>Bagian Tapem</b>
		1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 118,042,000	Rp. 118,042,000	-	Rp.107,633,750	91.18%	Bagian Tapem
		2. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Rp. 4,958,000	Rp. 4,958,000	-	Rp.3,404,000	68.66%	Bagian Tapem
		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 9,728,000	Rp. 9,728,000	-	Rp.9,276,450	95.36%	Bagian Tapem

	1. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	<b>1. Penataan Organisasi</b>	<b>Rp.616,401,000</b>	<b>Rp815,175,000</b>	<b>Rp.198,774,000</b>	<b>Rp. 783,538,110</b>	<b>96.12%</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 179,881,000	Rp. 288,655,000	Rp.108,774,000	Rp. 284,229,915	98.47%	Bagian Organisasi
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.92,000,000	Rp. 162,000,000	Rp.70,000,000	Rp.155,605,766	96.05%	Bagian Organisasi
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.276,318,000	Rp.304,622,000	Rp.28,304,000	Rp.,288,910,204	94.84%	Bagian Organisasi
		4. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp11,500,000	Rp. 11,500,000	-	Rp. 10,320,000	89.74%	Bagian Organisasi
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp56,702,000	Rp. 48,398,000	(Rp. 8,304,000)	Rp44,472,225	91.89%	Bagian Organisasi
	1. Persentasi peraturan bidang Ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	<b>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Rp.284,000,000</b>	<b>Rp.284,000,000</b>	-	<b>Rp.243,595,425</b>	<b>85,77%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
	2. Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Ekonomi	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.34,000,000	Rp.36,887,000	Rp.2,887,000	Rp. 35,998,750	97.59%	Bagian Perekonomian
		2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 110,000,000	Rp. 111,475,000	Rp.1,475,000	Rp. 94,772,775,-	85.02%	Bagian Perekonomian
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 140,000,000	Rp. 135,638,000	(Rp.4,362,000)	Rp. 112,823,900	83.18%	Bagian Perekonomian

		<b>2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp. 125,000,000</b>	<b>Rp. 130,000,000</b>	<b>Rp. 5,000,000</b>	<b>Rp. 119,601,301</b>	<b>90,13%</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
		1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 125,000,000	Rp. 130,000,000	Rp. 5,000,000	Rp. 119,601,301	90,13%	Bagian Perekonomian
<b>JUMLAH SASARAN 1</b>			<b>Rp.10,458,477,000</b>	<b>Rp.11,847,251,000</b>	<b>Rp. 1,388,774,000</b>	<b>Rp.10,301,799,272</b>	<b>86,96%</b>	
<b>SASARAN 2</b> Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan Pemerintah daerah	1. Prosentase verifikasi draft dokumentasi hukum	<b>1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp.1,187,800,000</b>	<b>Rp.1,193,292,000</b>	<b>Rp. 5,492,000</b>	<b>Rp. 820,369,010</b>	<b>68,75%</b>	<b>Bagian Hukum</b>
		1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 249,000,000	Rp. 249,000,000	-	Rp. 184,169,035	73.96%	Bagian Hukum
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 443,800,000	Rp. 359,292,000	(Rp.84,508,000)	Rp. 124,500,450	34,65%	Bagian Hukum
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 495,000,000	Rp. 585,000,000	Rp.90,000,000	Rp. 511,699,525	87.47%	Bagian Hukum
<b>JUMLAH SASARAN 2</b>			<b>Rp.1,187,800,000</b>	<b>Rp. 1,193,292,000</b>	<b>Rp.5,492,000</b>	<b>Rp. 820,369,010</b>	<b>68,75 %</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b> Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	1. Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%	<b>1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp. 269,000,000</b>	<b>Rp. 279,000,000</b>	<b>Rp.10.000.000</b>	<b>Rp.262,828,850</b>	<b>94,20%</b>	<b>Bagian Adpemb</b>
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 65,000,000	Rp.65,000,000	-	Rp. 62,030,900	95,43%	Bagian Adpemb
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.98,000,000	Rp. 98,000,000	-	Rp. 90,576,150	92,42%	Bagian Adpemb
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 106,000,000	Rp. 116,000,000	Rp.10.000.0000	Rp. 110,221,800	95,02%	Bagian Adpemb

		Pelaksanaan Pembangunan						
	1. Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, Instruksi Bupati, SE)	<b>1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 125,000,000</b>	<b>Rp. 125,000,000</b>	<b>-</b>	<b>Rp. 113,117,080</b>	<b>90,50%</b>	<b>Bagian PBJ</b>
	2. Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 77,200,000	Rp. 83,200,000	Rp.6,000,000	Rp. 72,787,500	87,48%	Bagian PBJ
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 47,800,000	Rp. 41,800,000	(Rp. 6,000,000)	Rp. 40,329,580	96,48%	Bagian PBJ
	1. Persentase saluran informasi publik yang aktif	<b>1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp.2,475,344,000</b>	<b>Rp.2,734,274,000</b>	<b>Rp.258,930,000</b>	<b>Rp. 2,669,910,929</b>	<b>97,65%</b>	<b>Bagian Prokompim</b>
		1. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 117,000,000	Rp. 152,000,000	Rp.35,000,000	Rp. 150,909,875	99,28%	Bagian Prokompim
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 117,000,000	Rp. 117,000,000	-	Rp. 110,467,100	94,42%	Bagian Prokompim
		3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp.2,241,344,000	Rp. 2,465,274,000	Rp.223,930,000	Rp. 2,408,533,954	97,70%	Bagian Prokompim
<b>JUMLAH SASARAN 3</b>			<b>Rp.2,869,344,000</b>	<b>Rp.3,138,274,000</b>	<b>Rp.268,930,000</b>	<b>Rp. 3,045,856,859</b>	<b>97,05%</b>	
<b>JUMLAH SASARAN 1,2, 3</b>			<b>Rp. 14,515,621,000</b>	<b>Rp. 16,178,817,000</b>	<b>Rp. 1,663,196,000</b>	<b>Rp. 14,168,025,141</b>	<b>87,57%</b>	

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

**Tabel 3.16**  
**Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR	KINERJA			ANGGARAN				
		KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU (Rp.)	PERUBAHAN	SELISIH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1.	Meningkatnya koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kab. Pati	1. Nilai LKJIP	68	64,60*	95%	Rp.10,458,477,000	Rp. 11,847,251,000	Rp.1,388,774,000	Rp.10,301,799,272	86,96%
		2. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%	100%	111,11%					
		3. Nilai LPPD	3 – 4	3,557*	118,56%					
2.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98%	63,63%	64,93%	Rp.1,187,800,000	Rp. 1,193,292,000	Rp.5,492,000	Rp.820,369,010	68,75%
3.	Meningkatnya pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan public	1. IKM	3,5	3,55	101,43%	Rp. 2,869,344,000	Rp.3,138,274,000	Rp.268,930,000	Rp. 3,045,856,859	97,05%
		2. Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	100%	100%	100%					
		3. Efisiensi pengadaan barang/ jasa pemerintah	7,5%	18,13%	241,73%					
		4. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	100%	100%	100%					
		5. Persentase saluran informasi public yang aktif diakses masyarakat	100%	100%	100%					
<b>JUMLAH, Sasaran 1,2,3</b>						<b>Rp. 14,515,621,000</b>	<b>Rp.16,178,817,000</b>	<b>Rp. 1,663,196,000</b>	<b>Rp. 14,168,025,141</b>	<b>87,57%</b>

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

: Nilai LKjIP Tahun 2021, Nilai LPPD Tahun 2018, Capaian Tahun 2022 masih tahap olah data.

Dari Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.048.817.000 dengan realisasi Rp. 14.048.423.840-Dengan serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 87,54%. Dengan demikian pada tahun anggaran 2022 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.000.393.160

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Masing-masing Bagian**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Bagian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)	Capaian kinerja
1	Kesejahteraan Rakyat	7.593.276.000	8.778.276.000	7.418.647.102	15,49%	100%
2	Perekonomian	409.000.000	414.000.000	363.196.726	12,27%	103,03%
3	Organisasi	616.401.000	815.175.000	783.538.110	3,88%	100%
4	Tata Pemerintahan	1.839.800.000	1.839.800.000	1.736.417.334	5,62%	113,05%
5	Hukum	1.187.800.000	1.193.292.000	820.369.010	31,25%	95,92%
6	Administrasi Pembangunan	269.000.000	279.000.000	262.828.850	5,8%	85%
7	Prokompim	2.475.344.000	2.734.274.000	2.669.910.929	2,35%	100%
8	PBJ	125.000.000	125.000.000	113.117.080	9,5%	92,70%

Sumber : Bagian di lingkungan Setda Kab. Pati

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan wujud semangat akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efektif dan efisien. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran secara umum disebabkan oleh :

1. Mekanisme perencanaan yang jelas.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan atas program yang telah dilaksanakan.
3. Melaksanakan pemantauan atas realisasi kegiatan baik dari sisi kinerja dan keuangan dalam setiap triwulan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan.

Adapun yang menjadi tantangan saat ini:

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan- persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan- tantangan ini terutama Nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan koordinasi dan penggalan berbagai masalah di masyarakat agar kebijakan tepat sasaran. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya untuk menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hal ini akan menjadikan LKjIP benar- benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik semakin baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 ini disusun dan kiranya dapat menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pati.

Pati, Pebruari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEPATI



**Drs. JUMANI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701114 199011 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUMANI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : Bupati Pati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Pati, 20 Januari 2022

  
Pihak Pertama  
  
Drs. JUMANI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701114 199011 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koordinasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	1. Nilai LKjIP	68
		2. Persentase OPD yang nilai AKIP-nya berkriteria baik	90%
		3. Nilai LPPD	3-4
2.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	1. Persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan dewan	98%
3.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	1. IKM	3,5
		2. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang Tertib Administrasi	100%
		3. Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7,5
		4. Persentase OPD yang Pengelolaan Pelayanan Publiknya Baik	100%
		5. Persentase Saluran Informasi Publik Pemerintah yang Aktif Diakses Masyarakat	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.091.745.000,00	APBD Kabupaten
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.620.876.000,00	APBD Kabupaten
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 803.000.000,00	APBD Kabupaten

Pati, Januari 2022

  
 Bupati Pati  
  
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati  
  
Drs. JUMANI, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701114 199011 1 001

**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI  
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022 TRIWULAN IV**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu kepada sasaran RKPD:

**A. Indikator Tujuan 1 : Nilai LKJIP**

1. Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik Target : 68 %  
 2. Nilai LPPD Target : 90 %  
 3. Persentase Peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan Dewan Target : 3-4 Nilai Target : 98 %

**B. Indikator Tujuan**

1. Persentase Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang tertib administrasi  
 2. Efisiensi pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah  
 3. Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik  
 4. Persentase saluran informasi publik Pemerintah yang aktif diakses masyarakat

**: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

- Target : 3,5 Nilai  
 Target : 100 %  
 Target : 7,5 %  
 Target : 100 %  
 Target : 100 %

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13				16=15/6*100	
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)
1			Non Urusan		5.A																						17	18	
1	Meningkatkan kinerja pelayanan sebagai penunjang urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			144,760,087	82,380,623	40,236,686	5,586,540	12,798,181	82,380,623	7,825,783	10,723,595	-	36,934,099	91.79	119,314,721	82.42											
			I	Nilai Kinerja PD dan terseleskannya Laporan Keuangan	Persen	100	100	100	0.00	100	100				100	100						100	100						
		4.1.1.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen	90	524,143	72	212,187	12	79,291	3	20,805	3	18,129	3	8,816	79,291	3	25,642	100.00	92.56	84	285,579	93.33	54.48	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	10	221,117	9	97,324	3	17,000	1	8,646	0	879	2	1,929	17,000	1	4,392	100.00	93.21	12	113,169	120.00	51.18	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	20	303,026	13	76,261	1	14,000	0	748	0	8,299	1	1,040	14,000	0	3,093	100.00	94.14	14	89,441	70.00	29.52	Perenc & Keu		
		4.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	4	7,034	1	8,291	0	0	0	2,421	1	1,924	8,291	0	3,382	100.00	93.20	5	14,761	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi PD	Dokumen	8	0	4	25,950	3	33,000	1	10,538	1	5,639	1	2,160	33,000	0	11,733	100.00	91.12	7	56,019	87.50	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Dokumen	8	0	4	5,620	4	7,000	1	874	1	891	1	1,763	7,000	1	3,042	100.00	93.85	8	12,190	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
						<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>										<b>100.00</b>	<b>ST</b>	<b>93.10</b>	<b>ST</b>			<b>95.50</b>	<b>#DIV/0!</b>						
		4.1.1.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Jenis Dokumen	25	2,815,022	20	16,854,950	5	17,193,817	1	3,489,643	0	4,448,151	0	4,406,487	17,193,817	1	3,562,091	100.00	92.51	25	32,761,322	100.00	1163.80			
		4.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	70	0	56	15,023,917	14	16,793,405	3	3,422,760	4	4,354,614	5	4,349,586	16,793,405	2	3,411,455	100.00	92.53	70	30,562,331	100.00	#DIV/0!	Perenc & Keu	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada	
		4.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	60	2,449,256	48	1,501,375	12	227,412	3	34,505	3	55,899	3	21,790	227,412	3	90,908	100.00	89.31	60	1,704,477	100.00	69.59	Perenc & Keu		





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																						
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100						15=7+13		16=15/6*100																			
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																
1	2	3	4	5	5.A											13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100		17	18																						
		4.1.1.2.08	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	20	11,549,011	16	7,303,196	4	2,499,148	0	515,375	0	540,882	0	471,359	4	732,800	4	2,260,415	100.00		90.45		20	9,563,611	100.00	82.81																				
		4.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	Surat	50,000	647,964	41,313	319,162	10,000	26,000	3,567	4,790	3,672	9,800	2000	0	2,686	11,400	11,925	25,990	119.25	ST	99.96	ST	53,238	345,152	106.48	53.27	Umum																			
		4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	Bulan	60	6,715,610	48	3,411,214	12	982,633	3	168,582	3	189,676	3	128,756	3	321,066	12	808,080	100.00	ST	82.24	T	60	4,219,294	100.00	62.83	Umum																			
		4.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	Bulan	60	753,882	48	362,885	12	100,555	3	12,165	3	20,565	3	7,865	3	55,823	12	96,418	100.00	ST	95.89	ST	60	459,302	100.00	60.92	Umum	Sesuai kebutuhan																		
		4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum (mendukung administrasi teknis/ keamanan)	Dokumen	60	3,431,555	48	3,209,935	12	1,389,960	3	329,838	3	320,842	3	334,738	3	344,511	12	1,329,928	100.00	ST	95.68	ST	60	4,539,863	100.00	132.30	Perenc & Keu																			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																					<b>104.81</b>	<b>ST</b>	<b>93.44</b>	<b>T</b>																									
		V	Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Persen	95	100	90	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111.11					100	111.11																							
		4.1.1.2.09	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	30	19,677,520	24	11,707,085	6	1,704,919	1	129,010	0	231,104	0	312,287	5	954,181	6	1,626,581	100.00		95.41		30	13,333,665	100.00	67.76																				
		4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan selama setahun	Unit	20	579,679	16	434,058	4	124,360	4	21,747	0	26,273	0	17,450	0	46,972	4	112,442	100.00	ST	90.42	ST	20	546,500	100.00	94.28	Umum																			
		4.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10,387,373	5,876,288	864,291	79,492	161,463	280,035	311,227	832,216										96.29	ST	6,708,504	64.58	Umum																						
				Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	Unit	545	5,465,974	436	124	10	34	35	45	124	100.00	ST									560	102.75	Umum																						
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	535	3,648,383	510	120	41	19	28	32	120	100.00	ST									630	117.76	Umum																						
				Jumlah polis asuransi barang milik daerah yang mendapatkan jaminan selama setahun	Polis	195	1,273,016	159	41	0	41	0	0	41	100.00	ST									200	102.56	Umum																						
		4.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun	Paket	1,055	312,581	585	179,845	7	36,000	0	0	2	7,250	0	0	5	21,745	7	28,995	100.00	ST	80.54	T	592	208,840	56.11	66.81	Umum	Sesuai kebutuhan																		
		4.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya			7,370,987	4,622,118	514,758	0	0	0	0	0	508,343	508,343								98.75	ST	5,130,461	69.60	Umum																						
				Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	Paket	20	4,867,798	7	3	0	0	0	3	3	100.00	ST									10	50.00	Umum																						





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																			
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100						15=7+13		16=15/6*100																
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)													
1	2	3	4	5	5.A																						17	18																		
		4.1.1.2.13.4	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Dokumen	2	0	1	4,450	1	11,500	0	3,313	0	0	1	6,812	0	196	1	10,320	100.00	ST	89.74	T	2	14,770	100.00	#DIV/0!	Organisasi	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada															
		4.1.1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	5	612,612	4	179,608	1	48,398	1	13,428	0	4,726	0	20,360	0	5,959	1	44,472	100.00	ST	91.89	ST	5	224,080	100.00	36.58	Organisasi																
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		<b>100.00</b>	<b>ST</b>	<b>94.20</b>	<b>ST</b>			<b>96.64</b>	<b>#DIV/0!</b>																					
		<b>IX</b>	<b>Persentase saluran informasi publik yang aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>																		
		4.1.1.2.1.4	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitas keprotokolan dan kmpim yang dihasilkan	Laporan kegiatan	60	59,727,772	48	13,515,288	12	2,734,274	3	277,072	3	608,914	3	784,034	3	999,891	12	2,669,911	100.00		97.65		60	16,185,199	100.00	27.10																	
		4.1.1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	60	897,152	48	576,645	12	152,000	3	15,856	3	42,583	3	12,538	3	79,934	12	150,910	100.00	ST	99.28	ST	60	727,555	100.00	81.10	Prokmpim																
		4.1.1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan komunikasi pimpinan	Laporan	60	3,239,500	48	486,921	12	117,000	3	15,715	3	21,028	3	33,735	3	39,988	12	110,467	100.00	ST	94.42	ST	60	597,388	100.00	18.44	Prokmpim																
		4.1.1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				55,591,120		12,451,722		2,465,274		245,501		545,303		737,762		879,969		2,408,534			97.70	ST		14,860,256		26.73	Prokmpim																
				Jumlah laporan jenis informasi publikasi	Laporan	60	8,603,302	48		12		3		3		3			12			100.00	ST			60		100.00		Prokmpim																
				Jumlah laporan kegiatan WD dan WKD yang didokumentasikan	Laporan	60	4,490,736	48		12		3		3		3			12			100.00	ST			60		100.00		Prokmpim																
				Jumlah laporan publikasi yang terpasang	Laporan	60	36,316,457	48		12		3		3		3			12			100.00	ST			60		100.00		Prokmpim																
				Jumlah laporan unit media elektronik yang dikelola	Laporan	60	6,180,625	48		12		3		3		3			12			100.00	ST			60		100.00		Prokmpim																
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		<b>100.00</b>	<b>ST</b>	<b>97.13</b>	<b>ST</b>			<b>100.00</b>	<b>42.09</b>																					
		4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				70,087,456		30,627,330		11,811,368		519,124		4,126,343		2,115,242		3,214,724		9,975,433			84.46			40,602,764		57.93																	
				<b>I</b> <b>Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>		<b>100</b>		<b>95</b>	<b>0</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>105.26</b>			<b>90</b>		<b>94.74</b>																				
		4.1.2.2.01	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Jenis Dokumen	15	20,538,700	12	10,007,763	3	1,707,072	0	318,549	0	555,259	0	135,581	3	606,714	3	1,616,103	100.00		94.67		15	11,623,866	100.00	56.59																	
		4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintah				13,155,472		6,620,015		817,945		278,202		228,311		98,331		199,984		804,827			98.40	ST		7,424,842		56.44	Tapem																
				Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	10	7,031,735	8		2		2		0		0			2			100.00	ST			10		100.00		Tapem																
				Jumlah laporan fasilitas penyelenggaraan PATEN	Laporan	10	482,374	8		1		0		1		0				1			100.00	ST		9		90.00		Tapem																

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																					
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100						15=7+13		16=15/6*100																		
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	17	18															
1				Jumlah laporan rakor kewilayahan	Laporan	240	3,234,743	140		12		2		4		3		3		12		100.00	ST			152		63.33		Tapem																		
				Jumlah laporan rakor pejabat PD	Laporan	30	617,499	23		12		3		1		2		3		9		75.00	S			32		106.67		Tapem	sesuai kebutuhan																	
				Jumlah laporan SPM	Laporan	1	0	0		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			1		100.00		Tapem																		
				Jumlah LKP Kepala Daerah	Dokumen	10	1,219,872	8		2		2		0		0		0		2		100.00	ST			10		100.00		Tapem																		
				Jumlah tayangan LPPD	Media	10	569,249	7		1		1		0		0		0		1		100.00	ST			8		80.00		Tapem																		
		4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			6,071,231		2,957,749		807,500		32,071		321,226		27,035		365,099		745,430			ST	92.31	ST		3,703,179		61.00	Tapem																		
				Jumlah aparatur desa yang dibina	Desa	1,095	2,351,677	1,142		401		0		0		401		0		401		100.00	ST			1,543		140.91		Tapem																		
				Jumlah izin penataan dan pemanfaatan tanah kas desa	Izin	100	118,175	80		20		20		0		56		0		76		380.00	ST			156		156.00		Tapem	Sesuai ijin yang masuk																	
				Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dan movev pelaksanaan PilkaDes serentak	Jenis dokumen	1,095	2,119,995	522		0		0		0		0		0		0		0.00	SR			522		47.67		Tapem	Tidak ada pelaksanaan di tahun 2022																	
				Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi dan movev pengisian perangkat desa	Desa	150	566,291	89		250		200		0		0		0		200		80.00	T			289		192.67		Tapem																		
				Jumlah laporan fasilitasi penanganan kasus penyelesaian pemerintahan desa	Laporan	25	470,093	35		5		5		0		0		0		5		100.00	ST			40		160.00		Tapem																		
				Jumlah rancangan peraturan tentang desa	Peraturan	10	445,000	9		2		0		0		0		2		2		100.00	ST			11		110.00		Tapem																		
		4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1,311,997		429,999		81,627		8,276		5,723		10,215		41,632		65,846			T	80.67	T		495,845		37.79	Tapem																		
				Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan yang dilaksanakan	Dokumen	25	140,250	15		5		3		0		0		2		5		100.00	ST			20		80.00		Tapem																		
				Jumlah laporan hasil fasilitasi pendukung kegiatan pemilu	Laporan	5	921,373	3		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			5		100.00		Tapem																		
				Jumlah peserta sosialisasi kerjasama otonomi daerah	Orang	5	250,374	2		120		0		0		60		60		120		100.00	ST			122		2440.00		Tapem																		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>115.67</b>	<b>ST</b>	<b>90.46</b>	<b>ST</b>			<b>291.33</b>	<b>51.74</b>																						
			<b>II</b>	<b>Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>	<b>100.00</b>	<b>120.48</b>																	
			<b>III</b>	<b>Persentase peraturan bidang kesra yang sudah diundangkan/di dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101.01</b>	<b>50</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>																	
		4.1.2.2.02	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jenis Dokumen	50	32,380,123	36	17,546,833	9	8,778,276	0	39,313	2	3,271,099	3	1,822,215	4	2,286,021	9	7,418,647	100.00		84.51		45	24,965,480	90.00	77.10																			





No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan				
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100						15=7+13		16=15/6*100	
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)
1	2	3	4	5	5.A																					17	18				
		4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan				26,009,871		5,889,965		818,000		62,092		149,462		181,589		346,000		739,143		90.36		6,629,108		25.49				
			I	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	Persen	85		100		83		0		0		75		100		100		100		120.48		75		88.24			
			II	Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi Bupati, SE)	Persen	100		100		100		0		0		100		100		100		100		100		100		100			
		4.1.3.2.01	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jenis Dokumen	55	6,366,117	41	1,682,197	11	284,000	0	21,429	0	37,351	0	42,072	11	142,743	11	243,595	100.00		85.77		52	1,925,792	94.55	30.25		
		4.1.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi dan pembinaan BUMD dan BLUD	Laporan	220	1,090,985	173	275,465	44	36,887	12	6,822	12	7,984	12	6,209	8	14,984	44	35,999	100.00	ST	97.59	ST	217	311,464	98.64	28.55	Perekonomian	
		4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3,573,553		781,521		111,475		11,097		20,177		10,040		53,459		94,773			85.02	T		876,293		24.52	Perekonomian	
				Jumlah laporan / analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Laporan	125	584,000	103		35		6		9		9		11		35		100.00	ST			138		110.40		Perekonomian	
				Jumlah laporan/analisis hasil fasilitasi promosi daerah	Jenis dokumen	12	1,380,000	3		0		0		0		0		0		0		0.00	SR			3		25.00		Perekonomian	Tidak ada pelaksanaan di tahun 2022
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi EkuINDA	Laporan	11	92,500	9		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			11		100.00		Perekonomian	
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan distribusi dan harga pupuk	Laporan	190	229,092	122		27		6		2		10		9		27		100.00	ST			149		78.42		Perekonomian	
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan pengumpulan informasi dan sosialisasi tentang cukai	Laporan	65	825,911	52		4		0		2		2		0		4		100.00	ST			56		86.15		Perekonomian	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022(%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																					
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100						15=7+13		16=15/6*100																		
						K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)															
1	2	3	4	5	5.A																						17	18																				
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan	125	230,000	111		30		6		9		9		6		30		100.00	ST			141		112.80		Perekonomian																		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi TPKAD	Laporan	20	232,050	12		15		4		6		6		4		20		133.33	ST			32		160.00		Perekonomian																		
		4.1.3.2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1,701,579		625,211		135,638		3,510		9,190		25,823		74,301		112,824				83.18	T		738,035		43.37	Perekonomian																	
				Jumlah laporan/ analisis hasil fasilitasi pembinaan dan pengembangan LKM	Laporan	150	377,000	67		20		4		6		8		2		20		100.00	ST			87		58.00		Perekonomian																		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pemantauan dan pengawasan dana bergulir dan koordinasi kredit program	Laporan	150	281,500	114		40		8		12		12		8		40		100.00	ST			154		102.67		Perekonomian																		
				Jumlah laporan/ analisis hasil koordinasi pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Laporan	45	1,043,079	20		2		0		1		0		1		2		100.00	ST			22		48.89		Perekonomian																		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>103.33</b>	<b>ST</b>	<b>88.60</b>	<b>T</b>			<b>89.18</b>	<b>32.15</b>																						
			<b>II</b>	<b>Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>87.75</b>		<b>100</b>		<b>22.44</b>		<b>0</b>		<b>12.24</b>		<b>89.79</b>		<b>89.79</b>		<b>89.79</b>				<b>12.24</b>		<b>12.24</b>																				
		4.1.3.2.02	2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jenis Dokumen	15	3,591,005	12	1,086,118	3	279,000	0	19,384	1	74,351		48,435	2	120,659	3	262,829	100.00		94.20		15	1,348,947	100.00	37.56																			
		4.1.3.2.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen analisis dan pengkajian pembangunan daerah	Dokumen	2	0	1	40,758	1	65,000	0	6,174	1	31,939	0	9,420	0	14,499	1	62,031	100.00	ST	95.43	ST	2	102,789	100.00	#DIV/0!	Adpem	Sub Kegiatan baru, sehingga di renstra tidak ada																	
		4.1.3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1,426,618		433,735		98,000		9,254		24,993		20,627		35,703		90,576			92.42	ST		524,311		36.75	Adpem																		
				Jumlah dokumen laporan movev pembangunan infrastruktur	Laporan	5	996,774	4		1		0		1		0		0		1		100.00	ST			5		100.00		Adpem																		
				Jumlah dokumen rakor POK	Dokumen	20	429,844	16		4		1		1		1		1		4		100.00	ST			20		100.00		Adpem																		
		4.1.3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2,164,387		611,625		116,000		3,957		17,420		18,389		70,456		110,222			95.02	ST		721,847		33.35	Adpem																		
				Jumlah dokumen laporan movev pembangunan	Laporan	170	928,585	135		33		2		14		8		9		33		100.00	ST			168		98.82		Adpem																		



No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2022 yang dievaluasi (%)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan		
							7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13				16=15/6*100	
							K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu) DPA	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Kategori	Rp (Ribu)	Kategori			K	Rp (Ribu)
1				koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan		0	73,528	130,000		1,118	7,299		80,216		30,969		119,601			92.00	ST		193,130		#DIV/0!	Perekonomian				
				Jumlah hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Dokumen	2	0	1	1	0	0		1	0		1	0	100.00	ST			2	0.00			Perekonomian				
				Jumlah laporan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal	laporan	2	0	1	1	0	0		0	0		0	0.00	SR				1	0.00			Perekonomian	Anggaran digeser ke Satpol PP oleh karena adanya surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100.00</b>	<b>ST</b>	<b>92.00</b>	<b>ST</b>			<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							<b>52,866,054</b>		<b>6,167,756</b>		<b>17,073,986</b>		<b>10,122,614</b>		<b>14,284,318</b>		<b>47,648,675</b>													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D 3)																<b>99.62</b>	<b>ST</b>	<b>89.92</b>	<b>T</b>			<b>101.20</b>	<b>#DIV/0!</b>							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya:																														